

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat. 2008. Efektivitas Organisasi Edisi Pertama. Jakarta: Airlangga.
- Agung,K. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.
- Akadun. (2009) Teknologi Informasi Administrasi. Bandung, Alfabeta
- Anityasari M. (2019). SMART CITY: Bunga Rampai Pengetahuan Gagasan & Rekomendasi ITS untuk Indonesia. In Smart City: Konsep Model dan Teknologi.
- BPS Gowa. (2023). Kabupaten Gowa dalam Angka 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 239.
- Dahlila, D., & Frinaldi, A. (2020). Inovasi Dukcapil Digi Mobil dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman. JESS (Journal of Education on Social Science), 4(2), 241. <https://doi.org/10.24036/jess.v4i2.285>
- Dunn, WN (2013). Pendahuluan Analisis Kebijakan Publik. Pers Universitas Gajah Mada.
- Dwiyanto Agus. 2015. Manajemen Pelayanan Public Inklusif Dan Kolaborasi.Yokyakarta: Gajamada Unversitas Press.
- Dwiyanto. 2012. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaboratif.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendy Onong Uchjana. 2008. Dinamika Komunikasi. Bandung: PT. Remaja.
- Etzioni, A. (1964). Organisasi Modern. Balai Prentice
- Georgopoulos, BS, & Tannenbaum, AS (1957). Sebuah Studi Efektivitas Organisasi. Tinjauan Sosiologis Amerika, 22(5), 534. <https://doi.org/10.2307/2089477>
- Gibson James L. John M. Ivancevich dan James H. Donnely Jr. 2006. Organisasi: Perilaku Struktur Proses. (Terjemahan) Edisi Delapan. Jakarta:Binarupa Aksara

- Giffinger R. & Pichler-Milanović N. (2007). Smart cities: Ranking of European medium-sized cities. Centre of Regional Science Vienna University of Technology.
- Gil-Garcia, J. R., & Martinez-Moyano, I. J. (2007). Understanding the evolution of e-government: The influence of systems of rules on public sector dynamics. *Government information quarterly*, 24(2), 266-290.
- Hall, RP (1989). Pendekatan komputasi untuk penalaran analogis. *Kecerdasan Buatan*, 39(1), 39–120. [https://doi.org/10.1016/0004-3702\(89\)90003-9](https://doi.org/10.1016/0004-3702(89)90003-9)
- Handayani. 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Repika Aditama.
- Hapsari, K., & Priyadi, Y. (2017). Perancangan Model Data Flow Diagram untuk Mengukur Kualitas Website Menggunakan Webqual 4.0. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 7(1), 66. <https://doi.org/10.21456/vol7iss1pp66-72>
- Hardono, W., Pemerintahan, J. I., & Fisipol, F. (2016). Analisis Kualitas dan Efektivitas E-Government Sebagai Media Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015
- Heeks, R. (2001). Memahami e-Governance untuk Pembangunan. *Jurnal Elektronik SSRN*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3540058>
- Heeks, R. (2003). Kebanyakan Proyek eGovernment-for-Development Gagal: Bagaimana Risiko Dapat Dikurangi? *Jurnal Elektronik SSRN*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3540052>
- Hidayat. 1987. *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gadjadara University Press.
- Holle, Erick S. 2011. "Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi dalam Meningkatkan Public Service". *Jurnal Sasi* Vol.17 No.3.
- Indrajit, Richardus Eko. 2004. *Electronic Government: Strategis Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi
- Japami, W., & Eriyanti, F. (2019). Efektivitas Pelayanan Keliling Online Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 75–85. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i2.22>

- Kasim, Azhar. 1993. Pengukuran Efektivitas Organisasi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kazmi, S. N. A. (2010). Factors influencing e-Governance implementation: Issues and challenges in Pakistan. Fifth International Conference on Digital Information Management (ICDIM), 326–331. <https://doi.org/10.1109/ICDIM.2010.5664643>
- Khoirul Anwar, Djumiarti Titik, & Rihandoyo. (2013). Analisis Faktor-Faktor Keberhasilan Elektronik Government pada Pemerintah Kabupaten Jepara. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 2, 1–10.
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Mengembangkan E-government yang berfungsi penuh: Model empat tahap. *Informasi Pemerintah Kwartalan*, 18(2), 122–136. [https://doi.org/10.1016/S0740-624X\(01\)00066-1](https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00066-1)
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2002). “Layanan Publik yang Lebih Baik melalui e-government”: Artikel Akademik untuk mendukung Layanan Publik yang Lebih Baik melalui e-government.”
- Miftah Thoha 2000 Peran Ilmu Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik Orasi Ilmiah Disampaikan padapembukaan Kuliah PPS UGM tahun Akademik 2000/2001 4 September 2000 hal. 3.
- Miles M.B & Huberman 1992 Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohadi. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Moon, M. J. (2002). The evolution of e-government among municipalities: rhetoric or reality?. *Public administration review*, 62(4), 424-433.
- Musa, S. (2016). *Journal of Telecommunications System & Smart Cities - A Roadmap for Development*. 5(3), 3–5. <https://doi.org/10.4172/2167-0919.1000144>
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2, 32–42.
- Othenk. (2008). Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas. Tersedia di <http://literaturbook.blogspot.co.id>

- Scholl, H. J., & Scholl, M. C. (2008). E-government adoption and transparency: An empirical investigation. *Proceedings of the 41st Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, 1-10
- Sedarmayanti. 2006 *Analisis Efektivitas Organisasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sharma, SK (2015). Adopsi layanan e-government. *Mengubah Pemerintahan: Orang, Proses dan Kebijakan*, 9(2), 207–222. <https://doi.org/10.1108/TG-10-2014-0046>
- Sharma, SK, & Gupta, JN (2003). Membangun blok dari e-government: Sebuah kerangka kerja. *Jurnal Perdagangan Elektronik dalam Organisasi (JECO)*, 1(4), 34–48.
- Steers Richard. M. 2005. *Efektivitas Organisasi*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga
- Stewart, J., & Clarke, M. (1987). ORIENTASI PELAYANAN PUBLIK: ISU DAN DILEMA. *Administrasi Publik*, 65(2), 161–177. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1987.tb00654.x>
- Sugiyono, (2012), *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutrisno, E. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Jl. Tambora Raya No.23 Rawa Mangun : Jakarta.
- Sutrisno, E. (2007). *Budaya Organisasi*, Jakarta: Kencana 2007.
- Suprawoto, *Pelayanan Publik Melalui EGovernment (Studi tentang Pelayanan KTP, e- Procurement dan PSB-Online di Kota Surabaya)*. Disertasi. Universitas Brawijaya, Malang.2005
- Weerakkody, V., El-Haddadeh, R., Al-Shafi, S., & Hindi, N. (2007). Assessing e-government web portal quality using a modified Delone and McLean model. *Transforming Government: People, Process, and Policy*, 1(3), 245-257.
- Wright, T., & Deakin, N. (1990). *Mengkonsumsi Pelayanan Publik*. Routledge.
- Yuni, I. S., & Adnan, M. F. (2022). Efektivitas Penerapan Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile Dalam Upaya Mendukung Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan*

Pendidikan), 6(1), 1982–1994.
<https://doi.org/10.58258/jjisip.v6i1.2648>

Zhao, F., José Scavarda, A., & Waxin, M. (2012). Masalah dan tantangan utama dalam pengembangan e-government. *Informasi Teknologi & Manusia*, 25(4), 395–422.
<https://doi.org/10.1108/09593841211278794>

Peraturan Undang – Undang

Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Presiden RI, Nomor 95 Tahun 2018 tentang, Sistem, Pemerintahan Berbasis Electronic (SPBE).

Permendagri nomor 19 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan

Permendagri nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan pelayanan administrasi kependudukan secara daring.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik.

Undang-undang nomor 24, Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

L A M P I R A N

Lampiran 1 : Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan
1	Informan 1	H	Sub Bagian Perencanaan program e-government
2	Informan 2	AM	Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data (Pengelola Layanan Online)
3	Informan 3	B	Pengelola Layanan Online
4	Informan 4	SM	Pendaftaran penduduk layanan online
5	Informan 5	D	Masyarakat
6	Informan 6	A	Masyarakat
7	Informan 7	R	Masyarakat

Lampiran 2 : Wawancara Bersama pegawai Dukcapil Kabupaten Gowa



Gambar 1: Wawancara Bersama Sub bagian Perencanaan



**Gambar 2: Wawancara Bersama Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data
(Pengelola Layanan Online)**

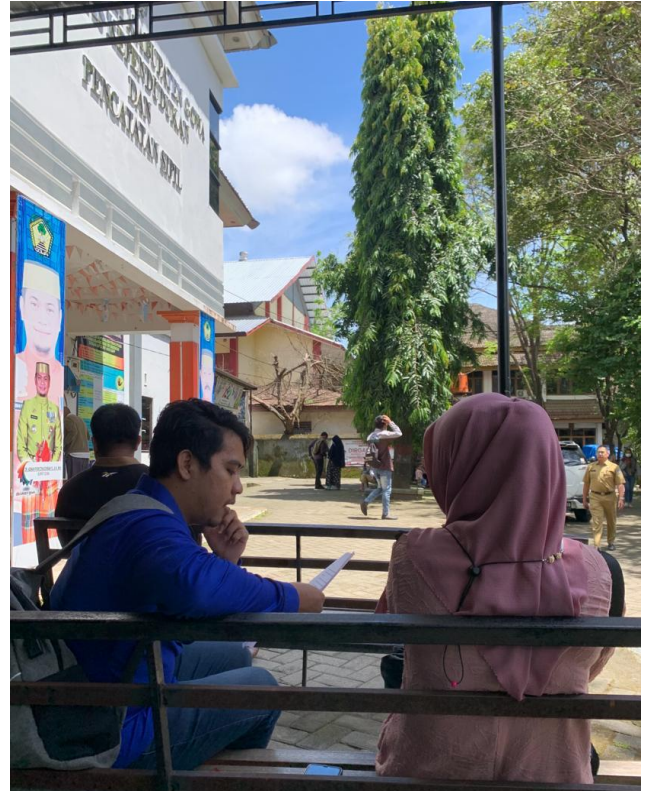


Gambar 3: Wawancara Bersama Pendaftaran penduduk layanan online



Gambar 4: Wawancara Bersama Pengelola Layanan


Lampiran 3 : Wawancara Bersama Masyarakat



Lampiran 4 : Suasana di kantor Dukcapil Gowa



Lampiran 5 : Pengajuan Permohonan Layanan Online



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SYARAT DAN CARA PENGAJUAN PERMOHONAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN APLIKASI WHATSAPP

Syarat Bagi Setiap Pemohon :

1. Wajib berkomunikasi HANYA dengan CHAT saja;
2. Wajib memiliki EMAIL pribadi yang AKTIF;
3. Wajib menyampaikan Identitas Diri, mengajukan sendiri, TIDAK BOLEH DIWAKILKAN.

Cara Mengajukan Permohonan :

1. Silahkan mengajukan permohonan melalui CHAT W.A dibawah ini sesuai dengan Domisili Kecamatan masing-masing dan Jenis Permohonannya :

KECAMATAN	NOMOR W.A	JENIS PERMOHONAN BARU, UBAH-GANTI, HILANG
SOMBA OPU	0811 460 7361	KARTU KELUARGA, SURAT PINDAH (SKPWNI), AKTA KELAHIRAN, AKTA KEMATIAN, AKTA PERKAWINAN, AKTA PERCERAIAN
PARRIGI		
PALLANGGA	0811 460 7362	
MANUJU		
BONTOLEMPANGAN	0811 460 7363	
BAJENG		
BAJENG BARAT	0811 460 7364	
TOMBOLO PAO		
BIRINGBULLU	0811 460 7365	
BONTONOMPO		
BONTONOMPO SELATAN	0811 460 7365	
TINGGIMONCONG		
PARANGLOE	0811 460 7365	
BAROMBONG		
BONTOMARANNI	0811 460 7365	
PATTALLASSANG		
BUNGAYA	0811 460 7365	
TOMPOBULLU		

JENIS PERMOHONAN BARU, UBAH-GANTI, HILANG	NOMOR W.A	KECAMATAN
PENGADUAN dan SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN DENGAN BPJS, IMIGRASI, PERBANKAN dan lain-lain.	0811 460 7366	SELURUH KECAMATAN
Penerbitan KTP-el	0811 460 7367	




2. Menyampaikan melalui CHAT, secara SINGKAT dan JELAS jenis permohonan;
3. Mengirimkan semua BERKAS dan PERSYARATAN yang diminta oleh Petugas Layanan dalam bentuk 1 (SATU) file PDF yang dapat di baca oleh Petugas Layanan dengan JELAS;
4. Membuka ALAMAT EMAIL yang telah anda daftarkan kepada kami;
5. Cari EMAIL MASUK dari siakonline@dukcapil.kemendagri.go.id ikuti petunjuk untuk CETAK DOKUMEN, selanjutnya dapat di CETAK SENDIRI secara mandiri menggunakan Kertas HVS 80 gram, ukuran A4, warna Putih, TIDAK PERLU lagi datang ke kantor DISDUKCAPIL GOWA untuk menukar Dokumen, Karena DOKUMEN tersebut SUDAH ASLI. (Sesuai Permendagri Nomor 109 Tahun 2019).

Hari & Jam Operasional layanan **SENIN s/d JUM'AT**
08.00 - 14.00





PENDAFTARAN PENDUDUK

SEMUA PENGURUSAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA

PENERBITAN KK

Kartu Keluarga BARU

Untuk Penduduk Warga Negara Indonesia :

- buku nikah/akta perkawinan/akta percerai;
- SKPWNI (Surat Pindah) dari daerah asal;
- KK asli fotocopy.

Untuk Orang Asing :

- Kartu Izin Tinggal Tetap;
- buku nikah/akta perkawinan/akta percerai;
- SKPWNI (Surat Pindah) dari daerah asal;

PERUBAHAN Kartu Keluarga

- KK Asli;
- Penetapan/Pengalihan untuk perubahan NAMA TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR;
- Dokumen pendukung lain yang sah.

Kartu Keluarga RUSAK/ HILANG

Untuk Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) :

- Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian atau KK Asli yang Rusak ; dan
- KTP-el

Untuk Orang Asing :

- Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian atau KK Asli yang Rusak ; dan
- izin tinggal tetap;
- KTP-el

Penerbitan KTP-el BARU

Untuk Penduduk WNI :

- Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
- KK asli fotocopy.

Untuk Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap :

- Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
- KK asli fotocopy.
- Dokumen Perjalanan;
- Kartu Izin Tinggal Tetap.

Penerbitan KTP-el karena Pindah Datang

Untuk Penduduk WNI dalam wilayah NKRI :

- SKPWNI (Surat Keterangan Pindah WNI);
- KK asli.

Untuk Penduduk WNI dari luar wilayah NKRI :

- SKPLN (Surat Keterangan Pindah Luar Negeri);
- KK asli.

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan izin Tinggal Tetap Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap

- KK Asli;
- KTP-el Lama;
- Dokumen Perjalanan;
- Kartu Izin Tinggal Tetap.

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap

- Surat keterangan hilang dari Kepolisian;
- KTP-el rusak;
- KK Asli;
- Dokumen Perjalanan;
- Kartu Izin Tinggal Tetap.

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap

- KK Asli;
- KTP-el Lama;
- Kartu Izin Tinggal Tetap;
- surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting.

PEREMINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Tumanurung No. 2 Sungguminasa-Gowa, Kodepos 92111
Telepon & Fax : 0411-8988898 | e-mail : disdukcapigowa@gmail.com
website : www.disdukcapil.gowakab.go.id

PERSYARATAN PENGURUSAN/ PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018)

TTE (Tanda Tangan Elektronik)

Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

"PERUNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA BERKUALITAS"

LAYANAN KAMI LEBIH CEPAT!!!
meskipun Kepala Dinas Tidak Berada di Kantor.

PENGADUAN : <https://tppn.go.id> | disdukcapil.go.id | disdukcapil.go.id | disdukcapil.go.id

PENCATATAN SIPIL

SEMUA PENGURUSAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA

AKTA KELAHIRAN

Pencatatan Kelahiran WNI

- Surat keterangan kelahiran (RS-Bidan);
- buku nikah/akta perkawinan/akta percerai;
- KK;
- KTP-el.

Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya

- Berita Acara dan Kepolisian;
- Surat pernyataan tanggungjawab mutlak kelahiran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

Pencatatan Kelahiran Orang Asing

- Surat keterangan kelahiran (RS-Bidan);
- Surat keterangan kelahiran (RS-Bidan);
- Dokumen perjalanan; dan
- KTP-el atau Kartu Izin Tinggal Tetap atau Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Visa Kunjungan.

AKTA PERKAWINAN

Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di wilayah NKRI.

- Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- Pis foto berwarna suami dan istri;
- Kartu Keluarga (KK);
- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- Bagi Janda atau Duda karena Cerai Mati, maka melampirkan Akta Kematan pasangannya; atau
- Bagi Janda atau Duda karena Cerai Hidup, maka melampirkan Akta Perceraian.

Pencatatan Perkawinan Orang Asing di wilayah NKRI.

- Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- Pis foto berwarna suami dan istri;
- Dokumen Perjalanan;
- Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
- Kartu Keluarga (KK);
- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- Surat keterangan atau surat izin nikah.

AKTA KEMATIAN

Pencatatan Kematian di wilayah NKRI.

- Surat kematian dari Dokter atau Kepala Desa Lurah atau yang disebut dengan nama lain dan atau surat keterangan Kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas sebabnya;
- Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;
- Kartu Keluarga (KK) asli.

AKTA PERCERAIAN

Pencatatan Perceraian di wilayah NKRI.

- Selain Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Kutipan Akta Perkawinan;
- Kartu Keluarga (KK);
- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pencatatan Perceraian di luar wilayah NKRI.

- Kutipan akta perceraian / surat perceraian perceraian dari negara asal;
- Dokumen perjalanan Republik Indonesia;
- Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Lampiran 6 : DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan

 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231			
Nomor	: 12272/S.02/PTSP/2023	Kepada Yth.	Bupati Gowa
Lampiran	: -		
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>		
di- Tempat			
Berdasarkan surat Dekan FISIP PPs Univ Hasanuddin Makassar Nomor : 1555/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 27 Februari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:			
N a m a	: HARDI SETIAWAN		
Nomor Pokok	: E012212001		
Program Studi	: Administrasi Publik		
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S2)		
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km., 10 Makassar		
PROVINSI SULAWESI SELATAN			
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :			
" EFEKTIVITAS E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN GOWA "			
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 28 Februari s/d 28 Mei 2023			
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.			
Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.			
Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 28 Februari 2023			
A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN			
			Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M. Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA Nip : 19630424 198903 1 010
Tembusan Yth			
1. Dekan FISIP PPs Univ Hasanuddin Makassar di Makassar;			
2. <i>Pertinggal.</i>			

Lampiran 7 : DPMPTSP Kabupaten Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Website: dpmptsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/243/DPM-PTSP/PENELITIAN/III/2023
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
Kab. Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 12272/S.02/PTSP/2023 tanggal \$(izin_tgl_permohonan) tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **HARDI SETIAWAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Halmahera Utara / 7 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nomor Pokok : E012212001
Program Studi : Administrasi Publik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Btn Griya Persda Manggarupi

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :
"EFEKTIVITAS E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN GOWA"

Selama : 28 Februari 2023 s/d 28 Mei 2023
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian** tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : \$(izin_tanggal_penetapan)



Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. **BUPATI GOWA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Dekan FISIP PPs Univ Hasanuddin Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal

REGISTRASI/458/DPM-PTSP/PENELITIAN/III/2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicantik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicantik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSEI-BSSN.



Lampiran 8 : Surat Keterangan



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Tumanurung No.2 Sungguminasa Kode Pos 92111,
Nomor Telepon dan Faksimile : 0411-8988898, e-mail : disdukcapilgowa@gmail

SURAT KETERANGAN

Nomor 00052/1719/Disdukcapil

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Nomor : 503/243/DPM-PTSP/PENELITIAN/III/2023, Tanggal 21 Februari 2023, Perihal Rekomendasi Penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, maka kami selaku Kepala Dinas dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama	: HARDI SETIAWAN
Tempat/Tgl.Lahir	: Halmahera Utara, 7 Desember 1999
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa (S2)
Alamat	: Btn.Griya Persada Manngarupi

Telah selesai mengadakan penelitian / pengumpulan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

An. Kepala Dinas
Sekretaris
Ub.

Kasubag Umum & Kepegawaian



KUSMA SUNASTRI, S.E.
Pangkat : Penata Tk.I , III/d
NIP.198211062011012004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Arsip.